Kebijakan *Student Loan* sebagai Alternatif Pembiayaan Pendidikan Tinggi di Indonesia: Tinjauan Ekonomi Politik

Salwa Fadhilah Humairah¹, Ike Wanusmawatie²

^{1,2} Universitas Brawijaya

e-mail: salwahumairah@student.ub.ac.id, ikew@ub.ac.id

Abstrak

Kemajuan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusianya yang ditopang oleh akses pendidikan yang adil dan merata. Di Indonesia, kesenjangan akses pendidikan tinggi menjadi isu serius akibat tingginya biaya kuliah dan arah kebijakan pendidikan yang semakin bersifat privat dan komersial, sebagaimana terlihat dalam UU Nomor 12 Tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis wacana kebijakan *student loan* sebagai solusi alternatif pembiayaan pendidikan tinggi di Indonesia melalui pendekatan *systematic literature review* dengan perspektif ekonomi politik dan model *state-centered approach*. Hasil kajian menunjukkan bahwa skema *student loan*, bila dirancang dengan tepat, dapat memperluas akses pendidikan, namun juga berisiko menimbulkan beban utang dan ketimpangan sosial apabila tidak diiringi dengan pengawasan ketat dan perlindungan terhadap peminjam. Pengalaman negara-negara seperti Australia dan Thailand menjadi rujukan penting dalam merancang kebijakan serupa di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keterlibatan aktif negara, desain kebijakan yang adil, dan tata kelola yang akuntabel menjadi faktor krusial dalam keberhasilan implementasi *student loan* di Indonesia.

Kata Kunci: *Student Loan, Pendidikan Tinggi, Kebijakan Publik, Ekonomi Politik, Aksesibilitas Pendidikan, State-Centered Approach*

Abstract

The progress of a country is not only determined by the wealth of its natural resources, but also by the quality of its human resources supported by fair and equal access to education. In Indonesia, the gap in access to higher education has become a serious issue due to the high cost of tuition and the direction of education policy that is increasingly private and commercial, as seen in Law Number 12 of 2012. This study aims to analyze the discourse on student loan policies as an alternative solution to financing higher education in Indonesia through a systematic literature review approach with a political economy perspective and a state-centered approach model. The results of the study indicate that the student loan scheme, if designed properly, can expand access to education, but also risks creating debt burdens and social inequality if not accompanied by strict supervision and protection of borrowers. The experiences of countries such as Australia and Thailand are important references in designing similar policies in Indonesia. This study concludes that active state involvement, fair policy design, and accountable governance are crucial factors in the successful implementation of student loans in Indonesia.

Keywords: *Student Loan, Higher Education, Public Policy, Political Economy, Accessibility Of Education, State-Centered Approach*

PENDAHULUAN

Majunya suatu negara saat ini bukan hanya dilihat dari kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) saja, namun juga dilihat dan bertumpu pada Sumber Daya Manusia (SDM) yang harus memiliki kualitas pada berbagai aspek kehidupan. Pencapaian kemajuan yang ada diberbagi negara justru dihasilkan melalui adanya penetapan strategi penguatan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Pola yang diciptakan oleh negara-negara maju yaitu menempakan urutan prioritasnya pada pembangunan kualitas manusia yang dianggap sebagai 23344ebag utama yang dianggap mampu

mendorong produktivitas yang tinggi sehingga menghasilkan keuntungan yang besar. Keuntungan ini yang dianggap dapat memungkinkan adanya peningkatan investasi, memperkuat pembangunan SDM, memperbesar kapasitas produksi, dan secara keseluruhan mempercepat kemajuan nasional (Farhan Ferdino & Sirozi, 2025). Pembangunan kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia merupakan bagian dari hak sosial yang tertuang pada Pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang penjaminan hak atas penerimaan akses pendidikan sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia yang diakui oleh negara. Hak sosial ini juga dijelaskan secara khusus dalam Pasal 28C yang mendefinisikan hak asasi pendidikan sebagai hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui proses pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya untuk terus meningkatkan kualitas hidup pribadinya serta kesejahteraan seluruh umat manusia. Akan tetapi, realitas dari keadaan pendidikan di Indonesia saat ini menunjukkan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi belum sepenuhnya dapat diakses oleh seluruh kelompok masyarakat. Aksesibilitas pendidikan di Indonesia masih sulit dijangkau oleh sebagian kelompok masyarakat akibat adanya kesenjangan perekonomian. Permasalahan ini diperkuat dengan data yang menunjukkan hanya 1.8 juta siswa yang dapat melanjutkan ke ranah perguruan tinggi, mayoritas disebabkan oleh kondisi ekonomi. Padahal data menunjukkan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) setiap tahunnya sebanyak 3,7 juta siswa. Berdasarkan analisis laju kenaikan biaya pendidikan perguruan tinggi, menunjukkan terus mengalami kenaikan yang sangat signifikan pertahunnya dari perguruan tinggi negeri (PTN) sebesar 1,3% dan juga perguruan tinggi swasta (PTS) dengan kenaikan sebesar 6,96%. Selain itu masyarakat juga dihadapkan dengan kenaikan nilai inflasi pendidikan per tahun yang mencapai angka 15% berdasarkan kenaikan biaya kuliah per-semester di perguruan tinggi (Monica & Ravanti, 2024).

Problematika mengenai tingginya biaya pendidikan tidak hanya sebatas biaya yang terus meningkat tetapi berkaitan juga dengan regulasi kebijakan pemerintah yang semakin mengarah kepada proses privatisasi dan komersialisasi akses pendidikan, seperti penetapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti). Salah satu hal utama yang menjadi sorotan dalam UU Dikti ini yaitu berkaitan dengan tata kelola dan otonomi perguruan tinggi yang semakin mengunci aksesibilitas pada masyarakat kelompok sosial ekonomi tertentu untuk menempuh pendidikan tinggi. Proses pengaturan yang tertuang pada UU Dikti ini sering dianggap sebagai bentuk upaya pemerintah untuk melepaskan tanggung jawab dalam proses penyelenggaraan pendidikan dan pembangunan masyarakat. Hal ini tercermin dari adanya pembiaran harga dan biaya pendidikan yang diserahkannya penentuan kepada mekanisme pasar serta pihak korporasi. Akibatnya, perguruan tinggi bertransformasi ke arah privatisasi dan komersialisasi karena menjadi ajang bisnis, karena dapat dilihat dari kebijakan pencabutan subsidi pembiayaan dalam ranah perguruan tinggi oleh pemerintah dan memberikan hak kepada perguruan tinggi untuk bisa mengubah status menjadi PTN BH (Saputra, 2023). Perubahan status ini juga berpengaruh terhadap karakteristik perguruan tinggi yang sebelumnya publik menjadi privat. Tidak hanya berhenti pada kebijakan UU Nomor 12 Tahun 2012 ini saja saat ini pemerintah sudah mengumumkan adanya rancangan kebijakan sistem *student loan* yang akan diadopsi oleh pemerintah sebagaimana yang sudah diterapkan di negara maju. Dalam konteks perkembangan sistem pendidikan modern, *student loan* atau pinjaman pendidikan telah menjadi salah satu mekanisme pendanaan yang dianggap kebijakan yang umum oleh masyarakat di beberapa negara. Skema ini memungkinkan pelajar atau mahasiswa memperoleh dana untuk membiayai kebutuhan pendidikannya, baik dari pemerintah maupun lembaga keuangan swasta. Dana yang diberikan tersebut umumnya digunakan untuk menutupi biaya kuliah, buku, serta kebutuhan hidup selama masa studi. Meskipun demikian, pinjaman ini bukanlah bantuan hibah, melainkan kewajiban yang harus dikembalikan oleh penerima setelah masa studi berakhir (Ritonga *et al.*, 2025). Gagasan kebijakan ini tentunya menimbulkan pro dan kontra di masyarakat dengan persoalan tersebut, rencana penerapan kebijakan *student loan* oleh pemerintah menjadi sebuah titik krusial yang perlu dikaji secara mendalam. Kebijakan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pembiayaan, tetapi juga menyangkut tanggung jawab negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh warganya. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis lebih lanjut bagaimana sistem *student loan* akan dirancang dan diterapkan di Indonesia, serta sejauh mana keberadaan negara dalam regulasi

dan pengawasan kebijakan ini dapat menjamin prinsip keadilan sosial dan kesetaraan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.

METODE

Pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *systematic review* atau tinjauan pustaka sistematis terkait dengan kebijakan *student loan* di Indonesia ditinjau secara ekonomi politik. Tinjauan pustaka merupakan istilah yang digunakan pada suatu metode penelitian yang dirancang khusus untuk menghimpun dan mengevaluasi berbagai penelitian yang relevan dengan fokus pada topik tertentu. Tinjauan pustaka sistematis atau *systematic literature review* biasanya digunakan untuk menunjukkan pendekatan riset yang bertujuan mengidentifikasi, menyeleksi, dan menilai secara kritis temuan-temuan dari studi terdahulu yang berkaitan dengan suatu isu atau pertanyaan riset. Metode ini dilakukan secara terstruktur dengan mengikuti protokol yang telah ditentukan, namun tetap mempertimbangkan unsur subjektivitas dalam proses penelitian. Penelitian ini menggunakan data-data akademik yang diperoleh dan ditemukan melalui *Google Scholar*, *ResearchGate*, atau database jurnal ilmiah yang relevan dan terpercaya. Pada proses mencari sumber-sumber terkait, penelitian ini menggunakan kata kunci yang relevan yaitu "*student loan*" "kebijakan ekonomi politik," "*model state centered approach*," dan "literature review" (Al et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem *student loan* dalam pembiayaan pendidikan di perguruan tinggi

Student loan merupakan suatu sistem pinjaman dana pendidikan bagi mahasiswa yang bertujuan untuk mendukung kebutuhan selama mereka menjalankan pendidikan di perguruan tinggi. Sistem *student loan* ini pertama kali diterapkan di University of Bologna, Itali yaitu sekitar akhir abad ke-11. Kemudian sistem ini meluas hingga diikuti oleh University of Paris, Oxford University, dan Cambridge University dan menjadi fondasi awal diberlakukannya pinjaman bagi pelajar. Namun skema *student loan* baru ditetapkan menjadi kebijakan pada 1240 di Oxford University dengan tercatat secara resmi pada Uskup Lincoln, Robert Grosseteste. Sejarah lain juga menjelaskan bahwa skema *student loan* hadir sebagai bentuk dari evolusi yang ada pada perguruan tinggi dan peran negara hadir untuk dapat menyediakan dukungan secara finansial terhadap masyarakat yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan tinggi. Setelah diterapkan pertama kali di University of Bologna, Itali, skema ini terus mengalami perkembangan hingga pada abad ke-20 diadopsi oleh Australia dan Kolombia (Zachrie et al., 2024).

Seiring dengan perkembangan sistem manajemen pendidikan di perguruan tinggi, skema *student loan* mengalami perluasan dengan adanya jenis-jenis penerapan, yaitu:

1. Pinjaman dengan Skema Pembayaran Berdasarkan Waktu (*Time-Based Repayment Loans – TRBL*)

Jenis pinjaman ini menggunakan sistem pelunasan dalam jangka waktu tetap, misalnya sepuluh tahun. Ciri utamanya adalah tidak adanya perlindungan bagi lulusan yang mengalami kesulitan keuangan. Apabila peminjam gagal membayar, reputasi kredit mereka dapat terdampak buruk, yang selanjutnya membatasi akses terhadap fasilitas pinjaman komersial lainnya. Skema ini memiliki tingkat gagal bayar yang cukup tinggi dan dapat menimbulkan beban pengeluaran besar bagi pemerintah. Model pinjaman ini banyak diterapkan di negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Filipina, dan Thailand.

2. Pinjaman Berbasis Pendapatan (*Income Contingent Loans-ICL*)

Skema pinjaman ini menetapkan jumlah pembayaran berdasarkan pendapatan masa depan peminjam. Artinya, kewajiban membayar pinjaman hanya muncul setelah pendapatan peminjam mencapai ambang tertentu. Ciri khas sistem ini adalah adanya fleksibilitas pembayaran, di mana tidak ada kewajiban membayar jika peminjam berpenghasilan rendah, tidak bekerja, atau menjalankan peran sebagai perawat keluarga. Sistem ini memberikan perlindungan terhadap risiko gagal bayar dan membantu meringankan beban finansial peminjam. Skema ini umum ditemukan di negara-negara seperti Australia, Swedia, Inggris, dan Jerman (Zachrie et al., 2024).

Berdasarkan sejarah perkembangan dari sistem *student loan* perlu diperhatikan bahwa pemberian pinjaman pendidikan memang dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah akses

terhadap pendidikan tinggi, namun hal ini tidak menutup kemungkinan munculnya permasalahan baru. Beban utang dari pinjaman pendidikan (*student loan*) berpotensi menghambat lulusan dalam memperoleh pekerjaan dan terdapat risiko penyalahgunaan dana pinjaman oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang dapat menyebabkan pembengkakan anggaran penyaluran dana. Jika kebijakan ini akan diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah tingginya Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada perguruan tinggi, perlu melakukan analisis lebih dalam terkait sistem *student loan* ini dengan menganalisis pelaksanaannya di berbagai negara yang sudah menerapkan, hingga diperoleh jenis *student loan* yang tepat untuk di implementasikan (Monica & Ravanti, 2024).

Intervensi Pemerintah dalam Kebijakan *Student Loan*

Pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung skema pinjaman pendidikan karena dapat membantu mengatasi keterbatasan akses kredit akibat informasi yang tidak seimbang di pasar. Dalam kondisi di mana bank tidak dapat membedakan mana peminjam yang mampu membayar dan yang tidak, mereka cenderung menetapkan bunga tinggi untuk semua, yang justru membuat calon peminjam yang layak enggan meminjam. Hal ini bisa menyebabkan jumlah peminjam berkurang dan pasar kredit tidak berjalan optimal. Untuk itu, intervensi pemerintah melalui jaminan pinjaman atau subsidi bunga menjadi penting agar pinjaman pendidikan tetap terjangkau dan mampu meningkatkan akses pendidikan tinggi secara adil dan efisien. Pemerintah dinilai lebih mampu menyediakan program perlindungan (asuransi) bagi peminjam. Misalnya, skema pembayaran pinjaman berbasis pendapatan (*income-driven repayment/IDR*) yang dikelola oleh pihak swasta bisa saja gagal karena adanya masalah seleksi pendanaan. Subsidi dari pemerintah dapat membuat skema pembayaran berbasis pendapatan tetap berjalan meskipun menghadapi risiko yang berdampak negatif. Pemerintah juga lebih mampu menangani risiko lainnya, misalnya dengan menahan pengembalian pajak atau memaksa perusahaan memotong gaji peminjam untuk pembayaran pinjaman. Oleh karena itu, meskipun ada alasan kuat bagi pemerintah untuk campur tangan dalam pasar pinjaman mahasiswa, masih belum jelas seberapa besar intervensi tersebut harus dilakukan dan bagaimana sebaiknya dikelola (Yannelis & Tracey, 2022).

Polemik kebijakan peminjaman dana pendidikan di Indonesia

Sistem pemberian pinjaman dana pendidikan kepada mahasiswa sebenarnya telah diterapkan di Indonesia pada tahun 1982 melalui adanya program kredit Pendidikan yang lebih dikenal dengan Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI). Program KMI ini secara nyata disubsidi oleh pemerintah Indonesia yang kemudian diterapkan pada Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dalam bentuk likuiditas bersubsidi ke Bank Negara Indonesia (BNI). Namun kebijakan ini memiliki tujuan yang berbeda dari konsep kebijakan *student loan* yang diperkenalkan di berbagai negara karena pemerintah menerapkan kebijakan ini pada 1982 dengan tujuan agar dapat mendorong mahasiswa lebih cepat lulus dari perguruan tinggi. Pada masa itu, biaya kuliah di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) berkisar antara Rp 375.000 hingga Rp 562.000 per tahun. Sementara itu, program pinjaman pendidikan melalui Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI) menyediakan dana maksimal sebesar Rp 750.000 per tahun bagi mahasiswa jenjang S1, Rp 1,5 juta untuk jenjang S2, dan Rp 2,5 juta bagi jenjang S3, dengan suku bunga tahunan sebesar 6 persen. Pinjaman tersebut harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 10 tahun (Nahdi *et al.*, 2024).

Kebijakan ini diterapkan dengan ketentuan awal dengan ketentuan yang bisa menerima hanya mahasiswa yang telah menempuh antara 90 hingga 110 SKS. Namun, sejak tahun 1985, kebijakan ini diperluas sehingga mencakup mahasiswa yang telah menyelesaikan antara 110 hingga 120 SKS dari total beban studi 140 atau 160 SKS. Dengan demikian, KMI ditujukan bagi mahasiswa yang berada pada tahun keempat atau kelima masa studinya. Syarat yang diberlakukan untuk dapat mengajukan pinjaman pendidikan melalui program KMI ini, mahasiswa diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan administratif, antara lain menyertakan surat keterangan kondisi keuangan yang telah disahkan oleh petugas di wilayah domisili, surat keterangan sehat, serta surat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi seperti rektor, wakil rektor bidang kemahasiswaan, atau dekan fakultas. Selain itu, mahasiswa juga harus menyetujui kebijakan penahanan ijazah sebagai bentuk jaminan di pihak bank. Namun, kebijakan KMI ini mengalami kegagalan sehingga hanya

berlangsung sampai sekitar tahun 1980-an. Kegagalan disebabkan karena banyaknya kasus yang terjadi pada penerima dana KMI tidak melakukan pelunasan dana yang telah digunakan setelah lulus dari perguruan tinggi (Nahdi *et al.*, 2024). Hal ini terjadi karena mahasiswa yang menerima dana pinjam nyatanya tetap dapat melamar dan bekerja tanpa membutuhkan ijazah sehingga banyak mahasiswa yang tidak melunasi dana KMI kepada pihak bank. Melihat dari polemik dari kebijakan KMI yang sejenis dengan skema student loan dapat dilihat bahwa negara berperan langsung dalam menyediakan dana pinjaman pendidikan dengan subsidi melalui bank milik negara. Ini adalah bentuk konkret dari intervensi negara dalam menjawab kebutuhan biaya pendidikan yang dalam hal ini sejalan dengan model pendekatan *state-centered approach*. Pada teori ekonomi politik pembangunan dijelaskan bahwa model pendekatan *state-centered approach* menempatkan negara pada posisi penting karena mempunyai sumber daya dalam proses kebijakan dan tidak hanya menyediakan kerangka hukum tetapi juga melakukan fungsi distribusi sumber daya sedangkan kegagalan kebijakan KMI menunjukkan keterbatasan kapasitas negara dalam melakukan pengawasan dan menegakkan kebijakan secara efektif sehingga membutuhkan adanya aktor non-negara yang juga berperan dalam mendukung atau tidak mendukung perubahan kebijakan yang membentuk suatu kebijakan yang terdiferensiasi (Rizky *et al.*, 2024).

Polemik yang serupa juga baru terjadi dan banyak menimbulkan pro-kontra masyarakat, yaitu kerja sama Institut Teknologi Bandung dengan Danacita, perusahaan pembayaran pinjaman *online* pada tahun 2024 untuk sistem pendanaan pendidikan dan kursus kompetensi bagi pelajar dan tenaga profesional di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), merupakan faktor pemicu dibukanya pembahasan mengenai konsep student loan pada masyarakat (Monica & Ravanti, 2024). Masyarakat berpendapat bahwa dengan adanya kebijakan ini akan menimbulkan polemik baru di sistem pendidikan di Indonesia seperti, jika diterapkan sistem tersebut, malah akan menjadi masalah bagi masyarakat yang terilit hutang dari sistem tersebut di tengah kondisi sulitnya mendapatkan pekerjaan setelah kuliah. Tidak hanya itu saja pandangan masyarakat akan berdampak yang bisa ditimbulkan dari sistem ini yaitu mahasiswa yang telah lulus untuk mendapatkan pekerjaan akibat rekam jejak finansial yang buruk (Putri Vidiastuti & Adzam, 2024). Sementara itu, kerja sama ITB dengan Danacita mencerminkan kecenderungan pergeseran tanggung jawab negara yang seharusnya memberikan akses pelayanan pendidik kepada masyarakat namun mengalami pergeseran peran yang digantikan dengan adanya sektor swasta dalam pembiayaan pendidikan. Hal ini menandakan pergeseran dari pendekatan *state-centered* menuju model yang lebih *market-oriented* serta terlihat adanya pengaruh ekonomi neoliberal yang terlihat dari adanya perubahan yang mendasar dalam mekanisme pengaturan, pendanaan, serta pelaksanaan pendidikan. Dalam bidang pendidikan, dampak neoliberalisme tampak jelas pada cara pendidikan dikelola, didanai, dan dijalankan. Ideologi ini memberi pengaruh signifikan terhadap struktur organisasi, sistem pendanaan, dan praktik operasional pendidikan, yang secara umum mendorong pergeseran orientasi perguruan tinggi menuju pada efisiensi kinerja dan ekonomi (Farhan Ferdino & Sirozi, 2025).

Perbandingan sistem *student loan* di berbagai negara

Melihat adanya kemungkinan diterapkannya kebijakan *student loan* secara serius oleh pemerintah Indonesia dengan skema yang berbeda dari kebijakan Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI) yang telah diterapkan tahun 1982, melalui pernyataan yang dikemukakan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyatakan “Memang di Indonesia ini belum ada *student loan* yang disediakan pemerintah. Alhamdulillah sebetulnya kalau draftnya dan diskusi itu sudah lama, Dikti dan Kementerian Keuangan juga sudah mulai lagi membicarakan tentang *student loan* ini”. Pernyataan ini disampaikan dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) I Tahun 2024. Maka pemerintah harus dapat mengadopsi kebijakan ini dengan bercermin dengan negara-negara yang sudah menerapkan kebijakan ini, baik yang berhasil mengimplementasikan kebijakan ini dengan benar atau melihat dari negara-negara lain yang masih dalam proses penyempurnaan. Adapun negara-negara di dunia yang telah mengadopsi skema *student loan* menerapkannya dengan regulasinya masing-masing untuk memberikan pinjaman kepada mahasiswa dengan tujuan memberikan bantuan finansial berupa uang sejumlah yang dibutuhkan selama proses berlangsungnya pembiayaan kuliah. Contoh negara yang telah

menerapkan *student loan* kepada mahasiswa di negaranya yaitu Australia dan Thailand. Thailand menerapkan dua jenis skema pinjaman pendidikan. Skema pertama dikenal sebagai *Student Loan Fund (SLF)*, di mana pemerintah berperan sebagai penjamin atas pinjaman yang disalurkan kepada mahasiswa, baik melalui lembaga perbankan maupun langsung oleh pemerintah. Pinjaman ini memiliki ketentuan pelunasan dalam jangka waktu hingga 15 tahun. Skema kedua adalah pinjaman berbasis pendapatan, di mana pelunasan dilakukan melalui sistem perpajakan. Besarnya cicilan yang dibayarkan disesuaikan dengan kondisi ekonomi masing-masing debitur di masa mendatang, sehingga mencerminkan kemampuan finansial individu secara proporsional. Australia menerapkan dua program pinjaman pendidikan, yaitu *Higher Education Loan Program (HELP)* dan *VET Student Loans*, yang ditujukan untuk mendukung pembiayaan studi mahasiswa pendidikan tinggi dan pendidikan kejuruan (vokasi). Program ini dikelola oleh Departemen Pendidikan dan Pelatihan bekerja sama dengan *Australian Taxation Office (ATO)*, yang bertanggung jawab atas sistem pelunasan dan administrasi utangnya. Pinjaman dalam program ini diberikan tanpa bunga, namun jumlah utang akan disesuaikan setiap tahunnya mengikuti laju inflasi yang dihitung berdasarkan *Consumer Price Index (CPI)* atau indeks harga konsumen (Monica & Ravanti, 2024).

SIMPULAN

Penerapan kebijakan *student loan* sebagai alternatif pembiayaan pendidikan perguruan tinggi di Indonesia merupakan isu strategis yang perlu dikaji secara mendalam. Biaya pendidikan yang terus meningkat dan arah kebijakan yang semakin bersifat privat dan komersial, sebagaimana tercermin dalam UU Nomor 12 Tahun 2012, mempersempit akses pendidikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pengalaman program Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI) menunjukkan bahwa keberhasilan sistem pinjaman pendidikan tidak hanya bergantung pada ketersediaan dana, tetapi juga pada efektivitas pengawasan, kepastian regulasi, dan kesiapan lembaga pelaksana. Sementara itu, keterlibatan lembaga pembiayaan swasta seperti Danacita menunjukkan adanya pergeseran tanggung jawab dari negara ke sektor pasar, yang dikhawatirkan memperbesar risiko beban utang dan ketimpangan akses. Perbandingan dengan negara seperti Thailand dan Australia menunjukkan bahwa keberhasilan *student loan* menuntut adanya skema pelunasan yang adil, perlindungan terhadap peminjam, dan dukungan kelembagaan yang kuat. Oleh karena itu, jika kebijakan ini akan diterapkan di Indonesia, maka perlu dirancang secara hati-hati agar tetap menjamin hak pendidikan warga negara dan tidak menambah beban sosial-ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al, U., Mandar, A., Fauziah, S., & Sugiarti, Y. (2022). Literature Review: Analisis Metode Perancangan Sistem Informasi Akademik Berbasis Web. *Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer Fakultas Ilmu Komputer*, 8(2). <http://ejournal.fikom-unasman.ac.id>
- Farhan Ferdino, M., & Sirozi, M. (2025). DAMPAK EKONOMI NEOLIBERAL TERHADAP SISTEM DAN TATA KELOLA PENDIDIKAN DI INDONESIA. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dan Sains*, 6(1), 80–88.
- Luneto, R., & Farid, M. (2023). State and Social-Centered Approaches to The Political Economy of South Korea. *Intermestic: Journal of International Studies*, 7(2), 554. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v7n2.8>
- Mgaiwa, S. J., & Ishengoma, J. M. (2023). Financing higher education in Tanzania through students' loans scheme and its impact on equitable access. *Heliyon*, 9(3), e13943. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e13943>
- Monica, S. Y. H., & Ravanti, N. F. P. (2024). Pelanggaran Hak atas Pendidikan di Indonesia: Diskursus mengenai Student Loan sebagai Solusi Komersialisasi Perguruan Tinggi. *Padjadjaran Law Review*, 12(2), 196–211. <https://doi.org/10.56895/plr.v12i2.1833>
- Nahdi, S., Amalika, H., Azzahra, H., Firman, W., Program, N., Pembangunan, S. E., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2024). Studi Komparatif Student Loan Australia, Amerika dan Swedia Serta Potensi Penerapannya di Indonesia. In *Journal of Macroeconomics and Social Development* (Vol. 1, Issue 4). <https://economics.pubmedia.id/index.php/jmsd>
- Putri Vidiastuti, D., & Adzam, M. (2024). Inovasi Kebijakan Pendidikan Tinggi di Era Society 5.0 sebagai Solusi Kenaikan UKT. *SEMINAR NASIONAL FHSIP*, 1.

- Ritonga, M., Nurul Bariyah, O., Raihan Febriansyah, M., Kartika Susanti, D., Islamiati, S. H. D., Hamzah, V., & Lestari, A. (2025). Lembaga Pembiayaan Pendidikan dalam Mewujudkan Pendidikan yang Inklusif dan Berkelanjutan di Indonesia. *MISYKAT AL-ANWAR JURNAL KAJIAN ISLAM DAN MASYARAKAT*, 1. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/index>
- Rizky, L., Pratiwi, T. S., Wibawa, A., & Achdiyana, I. (2024). Peran Negara G20 dalam Percepatan Transisi Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk Mewujudkan Ketahanan Energi Nasional. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 29(3). <https://doi.org/10.22146/jkn.88751>
- Saputra, K. (2023). Dampak Kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) yang Mengakibatkan Munculnya Komersialisasi Pendidikan. *Journal on Education*, 5(4).
- Yannelis, C., & Tracey, G. (2022). Student Loans and Borrower Outcomes. *Annual Review of Financial Economics*, 14(1), 167–186. <https://doi.org/10.1146/annurev-financial-111720-092601>
- Zachrie, D., Dzil Izzati, I., Fath, A., & Lestari, W. T. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Mahasiswa Dalam Membayar Uang Kuliah Tunggal Menggunakan Sistem Student Loan Legal Protection for Students in Paying A Single Colleague Fee Using the Student Loan System. *FORSCHUNGSFORUM LAW JOURNAL*, 1(3).